



Judul : Yuk, Percepat Vaksinasi Pedagang Pasar Rakyat
Tanggal : Minggu, 26 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Permintaan Komisi VI Ke Mendag Yuk, Percepat Vaksinasi Pedagang Pasar Rakyat

POLITISI Senayan berharap, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi para pelaku usaha di pasar rakyat dan tradisional. Pasar rakyat saat ini menjadi kelompok paling rentan di masa pandemi ini lantaran tingkat vaksinasi masih sangat rendah.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam mengatakan, pedagang pasar rakyat atau pasar tradisional ini masih belum mendapat advokasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Yang dekat-dekat ini saja soal pemulihan ekonomi berbasis ‘PeduliLindungi’. Ini belum siap karena sebagian besar belum dapat vaksinasi,” kata Mufti di Jakarta, kemarin.

Mufti kemudian merujuk pada uji coba pembukaan pasar rakyat oleh pemerintah di Pasar Sederhana, Bandung, belum lama ini. Ternyata di pasar tersebut baru 8,9 persen yang mendapat akses vaksinasi. Ini belum pasar rakyat di daerah pemilihannya di Probolinggo yang ternyata juga tingkat vaksinasinya sangat rendah.

Menurutnya, Kemendag tidak memiliki mitigasi bahwa para pedagang pasar rakyat ini harusnya sudah divaksinasi secara besar-besaran sebelum dibuka. “Artinya tidak ada kepekaan untuk memberikan mereka vaksinasi secara massal,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Mufti mengatakan sikap Kemendag ini kontras dengan para pelaku usaha di mall-mall dan pasar modern yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 100 persen. Karena itu, diharapkan ada inisiatif juga dari Kemendag untuk mempercepat proses vaksinasi di pasar-pasar rakyat. Ini untuk memastikan roda ekonomi masyarakat menengah ke bawah tetap bergerak.

“Mohon maaf, bukan bermaksud membandingkan. Tapi kenapa kok Kementerian Koperasi dan UMKM bisa lakukan vaksinasi terhadap ribuan bahkan ratusan ribu pelaku UMKM di daerah-daerah,” ujarnya.

Ia juga berharap ada inisiatif dari pemerintah untuk memberikan insentif pajak atau keringanan biaya sewa bagi para pedagang pasar rakyat. Sebab mereka merasa ada nuansa ketidakadilan lantaran penenaan insentif ini hanya dikenakan bagi pelaku usaha di mall-mall. Karena itu, dia mendorong ada koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan kelonggaran terhadap pelaku ekonomi rakyat ini.

“Harapan kami keberpihakan kepada pedagang kecil ini terus dimunculkan karena esensinya terhadap pasar rakyat. Mall iya, tapi pasar rakyat juga. Karena jutaan rakyat kita ini juga banyak bergantung pada pasar tradisional yang tersebar di daerah-daerah,” tambah dia.

Sementara Menteri Perdagangan M. Luthfi menegaskan, tidak punya hak menentukan pemberian vaksinasi ke daerah-daerah termasuk pasar rakyat. Namun demikian, dia memastikan pihaknya memberikan keringanan untuk tetap beroperasi.

“Kalau syaratnya disamakan mall, artinya pasar itu tutup. Tidak ada yang bisa dagang. Kan nggak bisa,” tegasnya.

Namun demikian, eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini tetap berupaya memastikan agar pelaku pasar rakyat ini mendapatkan akses kemudahan vaksinasi. Hal ini pun sudah dilakukannya ketika pemerintah membuka Pasar Sederhana di Bandung di mana tingkat vaksinasi di sana baru 8,9 persen. ■ KAL